

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A'an Efendi, Freedy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Edited by Dessy Marliani Listianingsih. Cetakan Pe. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Emerson Yuntho, Aris Purnomo dan Wasingatu Zakiyah. *Panduan Eksaminasi Publik*. Edited by Febri Diansyah dan Donal Fariz. Cetakan Ke. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2011.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Leback, Karen. *Teori-Teori Keadilan*. Edited by Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media, 2018.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2016.

Manulang, Fernando M. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Edited by Suwito. Revisi. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ketujuh. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.

R.Soegidjatno Tjakranegara. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edited by Tarmizi. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. JURNAL

Akbar, Muhammad Kamil. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Dharmasisya* 1, No. 1 (2020):

352–63.

Aspani, Budi. “Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.” *Solusi* 16, No. 3 (2018): 344–52. <https://doi.org/10.36546/Solusi.V16i3.142>.

Efendi, A’an. “Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Yudisial* 12, No. 3 (2019): 327. <https://doi.org/10.29123/Jy.V12i3.380>.

Pranoto, Edi. “Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara.” *Spektrum Hukum* 16, No. 2 (2019): 90–101. <https://doi.org/10.35973/Sh.V16i2.1298>.

Puasa, Rafly Rilandi, Johny Lumolos, And Neni Kumayas. “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro.” *Jurnal Eksekutif* 1, No. 1 (2018): 1–10.

Putrijanti, Aju, And Lapon Tukan Leonard. “Kompetensi Peratun Untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, No. 1 (2019): 107–27. <https://doi.org/10.29303/Ius.V7i1.605>.

Rorong, Bherly Adhitya. “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Melakukan Diskresi Dikaji Menurut UU No 30 Tahun 2014.” *Journal Of Lex Administratum* 8, No. 1 (2020): 75–85.

Simbolon, Bob Humisar. “Pengujian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Dharmasiswa* 2, No. 2 (2022).

Sulistiyawan, Mario Julyano Dan Aditya Yuli. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.”

Jurnal Crepido 01, No. 01 (2019): 13–22.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.

Syam, Fauzi, Sukanto Satoto, And Helmi Helmi. “Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang.” *Undang: Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2023): 189–233. <https://doi.org/10.22437/Ujh.6.1.189-233>.

Zaky Arita, Elita Rahmi, Fitria. “Pelaksanaan Fungsi Penyiaran Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Pandemi COVID-19 Oleh TVRI Stasiun Jambi.” *Jurnal Of Administration Law* 2 (2021): 99–107.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

D. PUTUSAN

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 25/G/PTUN-MDN